

**AKUNTABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN  
PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN  
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN  
MASYARAKAT DI DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**Oleh:**

**Sania Luqyana**

**NIM. 07011181823035**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

**SANIA LUQYANA**

**07011181823035**

**Pembimbing**

**Tanda Tangan**

**Tanggal**

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**



**20/2025**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan,**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**SANIA LUQYANA**  
07011181823035

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 23 Mei 2025

Pembimbing :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si  
NIP. 197805122002121000
2. Lisa Mandasari, S.IP., M.Si  
NIP. 198603272023212029

Tanda Tangan



Mengetahui,



## PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sania Luqyana

NIM : 07011181823035

Jurusan: Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 20 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Sania Luqyana

NIM. 07011181823035

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”*

(Boy Candra)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tua Saya dan Tiga Saudara Tercinta
2. Keluarga dan Sahabat-Sahabatku
3. Seluruh dosen Administrasi Publik yang saya hormati
4. Almamater Kebanggaan

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif, sumber data adalah primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam aspek akuntabilitas keuangan, dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan secara baik. Penyerapan anggaran sudah dilakukan secara maksimal karena sistem pelaporan keuangan yang diterapkan sudah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan belum dapat diakses publik secara terbuka, laporan keuangan sudah disusun dengan jujur dan disampaikan secara terbuka. Keberhasilan Sumatera Selatan dalam meraih opini WTP mulai dari tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan baik. Akuntabilitas manfaat pada program tersebut dilakukan belum merata pada setiap Kabupaten/Kota dikarenakan terbatasnya anggaran. Akuntabilitas prosedural berhasil membuat tingkat penyerapan anggaran naik setiap tahun. Hasil penelitian ini merekomendasikan dinas ketahanan pangan dan peternakan membuka website resmi dalam menyediakan laporan program dan menyusun program kegiatan sesuai skara prioritas tiap daerah.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Diversifikasi, Ketahanan Pangan, Penyerapan Anggaran

**Pembimbing**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

**Indralaya, 22 Mei 2025**

**Ketua Jurusan Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

## ABSTRACT

*This study aims to describe and analyze the budget absorption accountability in the implementation of the Community Food Diversification and Resilience Improvement Program at the Food Security and Livestock Agency of South Sumatra Province. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data sources consist of both primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of the study, in terms of financial accountability, indicate that the budget absorption for the food diversification and resilience improvement program at the Food Security and Livestock Agency of South Sumatra Province has been conducted properly. Budget absorption has been maximized due to the implementation of a transparent and accountable financial reporting system. Although financial reports are not yet publicly accessible, they are prepared honestly and presented openly. South Sumatra's success in obtaining an Unqualified Opinion (WTP) from 2019 to 2023 reflects good financial management within the agency. However, the accountability for program benefits has not been evenly distributed across all regencies/cities due to budget constraints. Procedural accountability has succeeded in increasing the budget absorption rate each year. This study recommends that the Food Security and Livestock Agency establish an official website to publish program reports and develop activity programs based on the priority scale of each region.*

**Keywords:** *Accountability, Diversification, Food Security, Budget Absorption*

**Advisor**



**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

**Indralaya, 22 Mei 2025**  
**Head of Public Administration Department**  
**Faculty of Social and Political Science Sriwijaya University**



**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang digunakan sebagai syarat memenuhi kelulusan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam perjalanan karya akhir ini tentunya tidak lepas dari doa, dukungan moral, semangat, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam pengerjaan skripsi diberikan kelancaran serta kemudahan.
2. Kedua orang tua saya M. Sidik Abbas dan Trimurti Andriani, serta kakak saya Febriandy Adrianz, Helmi, Gaga Prakasha, Nadiah Putri Ramadhan, Vina Rezty Malina, dan Helmina yang selalu memberikan doa dan motivasi tak pernah berhenti mengiringi setiap perjuangan selama ini.
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu dan memberikan waktu untuk membimbing, memberikan nasehat dan masukan dengan penuh kesabaran untuk kelancaran skripsi.
5. Seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data skripsi.
6. Teman-teman jurusan Administrasi Publik yang telah mendukung penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang dan berusaha keras dalam pembuatan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Tanpa bantuan serta dukungan dari pihak-pihak diatas, penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia serta rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Palembang, 02 Juni 2025

Penulis



Sania Luqyana

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Keuangan Negara.....	14
2. Akuntabilitas .....	15
3. Anggaran Sektor Publik .....	22
4. Penyerapan Anggaran .....	24
B. Teori Akuntabilitas Yang Digunakan .....	26
C. Penelitian Terdahulu .....	28
D. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III .....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian.....	35
B. Lokus dan Fokus Penelitian .....	35
C. Sumber Data dan Jenis Data Penelitian .....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Proses Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Sistematika Penulisan .....	46
BAB IV .....	48
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	48

2.	Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan .....	49
3.	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.....	55
	Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	55
B.	Analisis dan Pembahasan.....	55
1.	Akuntabilitas Keuangan.....	55
2.	Akuntabilitas Manfaat.....	67
3.	Akuntabilitas Prosedural .....	76
BAB V.....		86
PENUTUP.....		86
A.	Kesimpulan .....	86
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....		90
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skor PPH Sumatera Selatan Tahun 2020.....	2
Tabel 2 Laporan Target dan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2020.....	7
Tabel 3 Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	8
Tabel 4 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 5 Fokus Penelitian.....	36
Tabel 6 Hasil Audit Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan .....	63
Tabel 7 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat .....	68
Tabel 8 Jumlah, jenis dan Lokasi penitipan Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kabupaten/Kota di Prov Sumsel .....	69
Tabel 9 Laporan realisasi APBD program peningkatan diversifikasi dan ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.....	80
Tabel 10 Matriks Hasil Temuan Penelitian.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 2 Model Interaktif Miles M.B & Huberman .....	45
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.....	55
Gambar 4 Laman Instagram Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.....	59
Gambar 5 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....	60
Gambar 6 Bukti Penyerahan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Wakil Ketua BPK RI.....	61
Gambar 7 Pedoman Program Kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan DKPP Provinsi Sumatera Selatan.....	65
Gambar 8 Kunjungan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ke Toko Kepo Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan .....	70
Gambar 9 Hasil Rekapitulasi skor PPH dan Konsumsi Pangan Provinsi Sumatera Selatan .....	71
Gambar 10 Hasil pengujian laboratorium residu pestisida .....	73
Gambar 11 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mengunjungi Gudang Bulog Sukamaju Bersama Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional .....	74
Gambar 12 Apel Senin Pagi.....	77
Gambar 13 Fingerprint di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.....	79
Gambar 14 Rapat evaluasi kegiatan Ketahanan Pangan guna mencapai target jangka menengah pada rencana strategis .....	80

## DAFTAR SINGKATAN

SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RAD	: Rencana Aksi Daerah
PPH	: Pola Pangan Harapan
KRPL	: Kawasan Rumah Pangan Lestari
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
DKPP	: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menjalankan suatu program dunia sebagai pengoptimalan potensi dan sumber daya setiap negara dengan waktu yang panjang melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki tujuan yang lebih variatif dan indikator keberhasilan yang lebih kompleks (Irhamisyah, 2019). Keanekaragaman hayati Indonesia dalam mempertahankan pangan nasional dilampirkan pada program SDGs tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat terhadap ketahanan pangan nasional salah satunya bertambahnya penduduk menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang diganti menjadi pemukiman, lahan industri, dan infrastruktur publik (Anggraini, 2018).

Hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa (BPS, 2021). Luas pertanian yang makin sempit menciptakan sebuah konflik dari sisi pemenuhan ketersediaan, akses maupun pemanfaatannya yang berpengaruh pada kebutuhan pangan manusia. Permasalahan kelangkaan pangan dapat mengganggu sistem keamanan manusia karena pangan merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Ketahanan pangan merupakan terbukanya akses oleh semua orang dengan sepanjang waktu terhadap pangan yang cukup dan kehidupan yang sehat (Erwandari, 2017).

Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan masih belum diolah secara maksimal untuk mencapai ketahanan pangan atau surplus pangan yang diharapkan tidak kekurangan pangan (Sabila, 2020). Adanya potensi lahan pertanian yang luas tetapi belum diolah secara maksimal menyebabkan konsumsi pangan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan masih tergantung pada satu komoditas yaitu beras sebagai sumber karbohidrat. Akibatnya konsumsi beras melebihi dari angka anjuran, sebaliknya beberapa komoditi pangan masih rendah seperti umbi–umbian, pangan hewani, kacang–kacangan, sayur dan buah sehingga menyebabkan konsumsi pangan penduduk belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), Hal ini ditunjukkan oleh skor PPH yang masih rendah. Berikut Skor Pola Pangan Harapan Sumatera Selatan.

**Tabel 1 Skor PPH Sumatera Selatan Tahun 2020**

No	Kelompok Pangan	Ideal	Energi (kkal/ka/hr)	% AKG	Skor Mutu	Skor Ideal
1.	Padi-padian	<b>1050</b>	1.228	58,5	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	<b>126</b>	53	2,6	1,4	2,5
3.	Pangan Hewani	<b>252</b>	284	13,5	23,0	24,0
4.	Minyak & Lemak	<b>210</b>	246	11,7	5,0	5,0
5.	Buah/Biji berminyak	<b>63</b>	14	0,7	0,4	10,0
6.	Kacang-kacangan	<b>105</b>	57	2,7	4,7	10,0
7.	Gula	<b>105</b>	107	5,1	2,4	2,5
8.	Sayur dan Buah	<b>126</b>	150	7,2	24,3	30,0
9.	Lain-lain	<b>63</b>	47	2,2	0,0	0,0
	Total	<b>2.100</b>	2.189	104,2	86,2	100

*Sumber: Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Sumatera Selatan*

Keragaman konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan belum beragam, hal ini ditunjukkan dengan skor PPH ideal 100 dan jika dilihat dari kontribusi konsumsi energi (% AKG) *actual disbanding* dengan komposisi energi harapan menunjukkan jika kelompok bahan pangan masih berada di bawah konsumsi harapan seperti kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan, sayur dan buah. Sedangkan untuk kelompok bahan makanan yang telah melebihi kecukupannya yaitu kelompok padi-padian, minyak, dan lemak melebihi komposisi energi harapan. Dari tabel tersebut dapat dilihat terdapat masalah konsumsi pangan dari aspek keragamannya. Upaya memantapkan ketahanan pangan adalah melalui percepatan penganekaragaman pangan yaitu diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan tidak ditujukan untuk mengurangi konsumsi beras, tetapi sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam hal produksi dan perkembangan teknologi pengolahan pangan, sehingga menghasilkan produk pangan yang beragam, bergizi, dan aman (Poerwanto, 2021).

Dalam bentuk pemanfaatan pangan dibutuhkan program atau kegiatan yang tentu saja berdasarkan pembiayaan dan anggaran yang tersedia untuk program atau kegiatan guna mencapai ketahanan pangan nasional dari konflik yang ada. Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan dibutuhkan proses dari tahapan pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Amatiran dan Molidya, 2020). Ketentuan keuangan negara diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya dalam UU tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan. Seiring adanya *good governance* dalam pengelolaan anggaran ditandai dengan tiga prinsip utama yaitu profesional, transparansi dan akuntabilitas telah mendorong pendekatan yang lebih sistematis dalam penggunaan anggaran (Amaral & Wiagustini, 2019). Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berhasil, bersih, berdaya guna, bertanggung jawab, dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (Sedarmayanti, 2012). Upaya pengembangan tersebut sejalan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.

Tingkat akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di Indonesia masih lemah sehingga perlu dilakukan suatu upaya perbaikan dengan mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitasnya (Hamdan dkk, 2020). Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi fenomena global termasuk di Indonesia, sehingga menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas yang menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya (Astuty, 2013). Akuntabilitas merupakan kewajiban

untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dari tindakan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Saragih dkk, 2020).

Lembaga Administrasi (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan akuntabilitas di sektor publik, perlu memperhatikan prinsip-prinsip dari akuntabilitas, yaitu: harus adanya komitmen oleh pimpinan dan staf instansi dalam melaksanakan misi yang akuntabel, suatu sistem dalam penggunaan sumber daya harus menjamin secara konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus ditunjukkan, memfokuskan pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, seluruh anggota instansi harus menerapkan kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif sebagai penyebab perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk teknik pengukuran kinerja, pemutakhiran metode, dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP RI, 2000). Salah satu jenis akuntabilitas yang perlu diperhatikan adalah akuntabilitas keuangan, instrumen terpenting dari akuntabilitas keuangan adalah keuangan pemerintah dan transparansi, dimana laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah mencerminkan bentuk akuntabilitas (Setyanto, 2018). Akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan yaitu masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah melalui surat kabar, internet belum menjadi hal yang umum.

Sebagai pelaksanaan tujuan pembangunan tersebut, melalui rencana aksi daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai misi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada RPJPD 2005-2025 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2020 tentang RAD Sumatera Selatan. Sebagai pelaksana tujuan pemerintah Sumatera Selatan melibatkan instansi pemerintah yang memiliki hak dan wewenang dalam mewujudkan ketahanan pangan Sumatera Selatan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan yang berhak menentukan perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi (RAD Sumsel, 2017)

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan meliputi keterjangkauan pangan masyarakat terpenuhi dengan cadangan pangan daerah merata antar wilayah, harga pangan stabil, konsumsi pangan bermutu dan aman dengan skor pola pangan tingkat konsumsi yang ideal dan jaminan pangan segar. Untuk mencapai sasaran tersebut melalui DKPP Provinsi Sumatera Selatan dengan meluncurkan beberapa kegiatan dan program sebagai Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Berikut laporan target dan realisasi anggaran kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui sumber dana APBD.

**Tabel 2 Laporan Target dan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan (Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan</b>	<b>142.600.000,-</b>	<b>141.279.200,-</b>	<b>99,07</b>
	Pemantauan dan Evaluasi Harga Pangan Strategis	2.600.000,-	2.513.000,-	96,67
	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah	125.000.000,-	124.969.200,-	99,98
	Monitoring dan Evaluasi Lumbung Serta Cadangan Pangan Masyarakat	15.000.000,-	13.796.500,-	91,98
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan</b>	<b>68.000.000,-</b>	<b>68.000.000,-</b>	<b>100</b>
	Analisa NBM dan PPH Ketersediaan	68.000.000,-	68.000.000,-	100
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan</b>	<b>361.000.000,-</b>	<b>355.883.950,-</b>	<b>98,58</b>
	Lomba Cipta Menu B2SA dan Promosi Konsumsi Pangan	15.000.000,-	14.612.900,-	97,42
	Analisis Situasi Konsumsi Pangan	25.000.000,-	24.999.750,-	100
	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	70.000.000,-	69.980.700,-	99,97
	Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	100.000.000,-	97.218.000,-	97,22
	Gerakan Pangan Bergizi dan Beras Kami Hemat (Gerakan PADI BERKAH)	150.000.000,-	148.097.600,-	98,73
	Pengembangan Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1.000.000,-	975.000,-	97,50
<b>4.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya</b>	<b>167.076.000,-</b>	<b>165.253.579,-</b>	<b>98,91</b>

	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	125.000.000,-	123.707.164,-	98,97
	Dewan Ketahanan Pangan	42.076.000,-	41.546.415,-	98,74

*Sumber: Laporan Tahunan APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa anggaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, pada program peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan mencapai 99,07%. Untuk program kegiatan peningkatan ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan realisasi sudah mencapai 100%, program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar mencapai 98,58%, dan program dukungan manajemen dan teknis lainnya mencapai 98,91%. Secara keseluruhan tahun 2020 sudah terealisasi dengan baik dan sudah mencapai persentase diatas 95%.

**Tabel 3 Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020**

NO	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Belum dilakukan	Sudah Dilakukan	Keterangan
1.	Program Peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	Oku Selatan, Musi Rawas Utara belum memiliki cadangan pangan.	Monitoring dan evaluasi lumbung pangan hanya dilakukan 2 daerah yaitu OKI dan OI	Monitoring dan evaluasi lumbung pangan rencana dilaksanakan 8 Kab/Kota tetapi terealisasi hanya OKI dan OI yang daerah tersebut sudah pernah menerima bantuan sosial berupa modal dari anggaran APBN.

2.	Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	Musi Banyuasin, Ogan Ilir	Melaksanakan PPH ketersediaan pangan.
3.	Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	Empat Lawang (belum sama sekali)	OKI, OI, Oku Selatan dan Musi Banyuasin	Diperlukan pengumpulan data keamanan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan

*Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022*

Merujuk pada observasi yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Sumatera Selatan dapat diuraikan:

1. Cadangan pangan tahun 2020 dialokasikan hanya 4.000 kg yang turun karena ditahun 2019 sebanyak 15.000 kg. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Pasal 3 menjelaskan “Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita pertahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional”.
2. Penganekaragaman konsumsi pangan keamanan pangan beberapa daerah yang belum dimasukkan dalam anggaran program. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Oku Selatan dan Musi Rawas Utara masuk dalam potensi bencana alam yaitu banjir dan longsor.

Rendahnya proporsi anggaran menyangkut pada fenomena kinerja keuangan menyulitkan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan pihak berwajib sulit untuk mengelola anggaran program yang ada dengan adil terhadap kebutuhan daerah.

Jika dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Pasal 4 ayat

1 menjelaskan: “Sasaran penyelenggaraan CPP adalah masyarakat di wilayah Sumatera Selatan yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat, rawan pangan, dan atau gejolak harga pangan sesuai dengan pertimbangan dan masukan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan/atau permintaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan belum menyesuaikan penyusunan dan perencanaan anggaran program dengan skala prioritas kegiatan daerah yang benar-benar *urgent*. Dengan terbatasnya anggaran, DKPP Provinsi Sumatera Selatan seharusnya dapat menyusun perencanaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang belum terlaksana sepenuhnya pada program dua program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yaitu program peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dan program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Merujuk pada penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas kebanyakan membahas dari pengelolaan anggaran, tidak membahas berdasarkan akuntabilitas dari penyerapan anggaran. Namun tentu saja ada perbedaan dalam setiap hasil penelitian. (Fait dkk, 2021), (Somantri dan Nanda, 2019), (Agustiani, 2019), (Ludani dkk, 2015), (Saragih dkk, 2020) memfokuskan penelitiannya pada pengelolaan anggaran dengan prinsip akuntabilitas, hasil penelitian kurangnya sumber daya manusia dan belum melibatkan masyarakat saat merencanakan anggaran yang sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, ada penelitian yang membahas tentang penyerapan anggaran oleh (Amaral & Wiagustini, 2019) dalam penyusunan anggaran menggunakan siklus

anggaran. Lalu ada penelitian (Hamdan dkk, 2020) yang mengkaji akuntabilitas anggaran melalui kajian hukum Islam. Sedangkan penulis menemukan penelitian yang mengkaji dari capaian kinerja yaitu penelitian (Indara, 2018) dan (Fiddin, 2021) akuntabilitas keuangan tidak berhubungan dengan capaian kinerja pemimpin dalam mengelola kebutuhan rakyat saat belanja publik. (Istiqomah, 2015) dan (Suratmi, 2014a) memfokuskan pada kinerja lembaga yaitu fungsi legislasi, anggaran, pengawasan serta akuntabilitas pada perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan terhadap akuntabilitas publik. Selanjutnya penelitian (Sayuti et al., 2018) memfokuskan penelitiannya pada peningkatan kinerja melalui konsep *value for money* dengan hasil penelitian anggaran yang tidak hemat dalam pelaksanaannya.

Sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian mengenai penyerapan anggaran yang menggambarkan tentang akuntabilitas dan dianalisis oleh teori akuntabilitas dari Mario D Yango dalam LAN dan BPKP (2000). Menurut Stelconi (2002) akuntabilitas berkaitan dengan informasi yang relevan, memenuhi kebutuhan, dan juga laporan secara langsung tersedia dan dapat diakses pihak pengguna informasi. Muncul tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas dari program ini dimana penyerapan anggaran yang sudah diatas 95% namun program masih belum terlaksana sepenuhnya dan masih belum sesuai kebutuhan daerah. Peneliti ingin melihat manfaat dan dampak setelah adanya program tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan melihat sisi akuntabilitasnya. Masalah ini penting untuk diteliti agar bisa tahu apakah DKPP Provinsi Sumatera Selatan sudah melaksanakan prinsip dari akuntabilitas. Dilihat dari latar belakang tersebut, penelitian dengan judul akuntabilitas penyerapan anggaran pelaksanaan program peningkatan diversifikasi dan

ketahanan pangan di DKPP Provinsi Sumatera Selatan, yang dikaji mengenai akuntabilitas dalam aspek keuangan, manfaat, dan prosedural.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti menetapkan perumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana Akuntabilitas Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan bahan masukan bagi kajian Administrasi Publik bidang Keuangan Negara terutama mengenai Akuntabilitas Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai akuntabilitas penyerapan anggaran program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan khususnya program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Bagi instansi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi terkait Akuntabilitas Penyerapan Anggaran sebuah program di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan agar dapat memecahkan permasalahan program yang telah dilaksanakan.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai program Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan memberikan informasi penyaluran program mulai dari penganggaran sampai pelaksanaannya. Diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dalam memanfaatkan keanekaragaman pangan dalam konsumsi sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, N. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2014-2015 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Bone Agustiani Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bone Nahariah Sekolah Tinggi Agama Islam ( STAI ) Al – Furqan Makassar Abstrak PENDA. *Al Ilmiah Al Tsarwah*, 2, 71–90.
- Amaral, J., & Wiagustini, L. P. (2019). Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministerio Das Obras Publicas Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 95. <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i02.p01>
- Amatiran dan Molidya. (2020). *Pengelolaan Keuangan Negara*. 12(2), 167–178.
- Anggraini, W. (2018). Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Kabupaten Oku Timur. *Jurnal AKTUAL*, 16(2), 99. <https://doi.org/10.47232/aktual.v16i2.24>
- Astuty, Elgia. dkk. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Unesa*, 1(2), 1–15.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ellwood, S. (1993). Parish Town and Councils: Financial Accountability and Managment. *Local Government Studies*, 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03003939308433687>
- Erwandari, N. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) dalam Meningkatkan Implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) dalam

- Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau. *Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 875–888.
- Fait dkk. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114.
- Fiddin, F. (2021). Akuntabilitas Keuangan Dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 63–70.  
<https://doi.org/10.35829/magisma.v9i1.137>
- Goulding, C. (2002). *Grounded Theory: A Partical Guide For Management, Business and Market Researchers*. Sage Publications.
- Hamdan dkk. (2020). Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah Berdasarkan Prinsip Islam (Studi: Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 147–160.
- Indara, A. (2018). Analisis Akuntabilitas Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Setelah Pemilihan Kepala Daerah Langsung. *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 190–212.  
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- Irhamyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 45–54.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–18.

- LAN & BPKP RI. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. In *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*.
- Ludani dkk. (2015). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ( Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(29).
- Miles M.B and Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, J., Tamar, M., & Indrayani. (2019). Kode Etik Aparatur Sipil Negara. *KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*, 5(1), 1–6.
- Poerwanto, R. (2021). *Merevolusi Revolusi Hijau* (Buku III). PT. Penerbit IPB Press.
- RAD Sumsel. (2017). *Rencana Aksi Daerah SDGs*. 17(2), 70–85.
- Rahmawati, R. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Sabila, S. (2020). Daya Dukung Pangan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 7(1), 59–68.  
<https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2020.007.1.8>
- Saragih dkk. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1–7.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi

- Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan).  
*ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28.  
<https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Pertama* (Edisi Revi). Mandar Maju.
- Setyanto, E. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survey atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA Penerapan SPI dan Penerapan SAP pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat) Eko. *Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 51–69.
- Somantri dan Nanda. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Eko Preneur*, 1(1), 126–132.
- Suparmoko. (2011). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik* (Keenam). BPFE.
- Suratmi, N. Made. dkk. (2014a). Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 2(1).
- Suratmi, N. Made. dkk. (2014b). Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 2(1).
- Swasnany, T. W. (2019). *Akuntabilitas Kinerja*. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Tedjo, P. (2019). Demokrasi, Kebijakan Umum, Dan Keputusan Politik. *Mimbar Administrasi*, 15(29), 14–30.

- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Wiratna, S. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.